*Journal of Golden Generation Multidisciplinary*
*Volume: 1, Nomor: 2, (2025), April: 159 - 168*
*Link Publish: https://ejournal.lppnusantara.com/index.php/jggmultidisciplinary/article/view/578*
*E-ISSN: 3123-6278; DOI: https://doi.org/10.65244/jggm.v1i2.578*

# Implementasi Kebijakan Pengelolaan Informasi Publik Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor

**Meyti Yuniarti [1], Rusliandy [2], Agus Suarman Sudarsa [3]**
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia [1,2,3]
*Corresponding Author:* meyti107@gmail.com, rusliandy1980@gmail.com, agussuarman08@gmail.com

***Info Artikel***
***Submitted:*** *28 Maret 2025*
***Revised :*** *08 April 2025*
***Accepted:*** *19 April 2025*
***Published:*** *30 April 2025*

***Keywords:*** *Public Policy, Information Disclosure, Policy Implementation, Transparency, Regional Government*

***Abstract***
*This study examines the implementation of public information management policies at the Bogor Regency Regional Secretariat. This research is motivated by the gap between established regulations and the low level of public utilization of public information services. The purpose of this study is to analyze policy implementation, identify obstacles, and formulate improvement strategies. The research used a qualitative approach with a case study method using interviews, observation, and documentation. The results indicate that policy implementation has been carried out through the development of internal regulations, the use of digital platforms, and stakeholder engagement. However, obstacles remain, such as limited human resources, weak coordination between work units, and low public participation. The novelty of this study lies in the integration of digital strategies, human resource capacity building, and strengthening public communication as solutions for policy implementation. This study concludes that policy effectiveness is highly dependent on adaptive strategies and collaboration between parties. This research provides theoretical contributions to the study of public policy implementation and practical implications for increasing transparency and public participation.*

***Kata Kunci***: *Kebijakan Publik, Keterbukaan Informasi, Implementasi Kebijakan, Transparansi, Pemerintah Daerah*

***Abstrak***
*Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan tingkat pemanfaatan layanan informasi publik oleh masyarakat yang masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan strategi perbaikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan melalui penyusunan regulasi internal, pemanfaatan platform digital, serta pelibatan pemangku kepentingan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar unit kerja, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi strategi digital, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan komunikasi publik sebagai solusi implementasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada strategi adaptif dan kolaborasi antar pihak. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam kajian implementasi kebijakan publik serta implikasi praktis bagi peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat.*

***This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.***
***Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara***

**Pendahuluan**

Pengelolaan informasi publik merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam era digital dan keterbukaan informasi, masyarakat memiliki hak fundamental untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, program, serta penggunaan sumber daya publik. Hak tersebut telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi secara terbuka dan akuntabel.

Dalam konteks pemerintahan daerah, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk menyediakan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses dengan mudah, cepat, dan relevan oleh masyarakat. Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk yang besar memiliki potensi kebutuhan informasi publik yang tinggi. Oleh karena itu, keberadaan Sekretariat Daerah sebagai pusat koordinasi administrasi pemerintahan menjadi sangat strategis dalam pengelolaan informasi publik.

Namun, berdasarkan kondisi empiris, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas implementasinya. Data menunjukkan bahwa tingkat kunjungan masyarakat terhadap website resmi pemerintah daerah masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan platform digital sebagai media informasi publik belum optimal. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan adanya gap antara regulasi dan implementasi di lapangan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di berbagai daerah menghadapi permasalahan yang relatif serupa, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi kebijakan pada tingkat Sekretariat Daerah masih terbatas, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan kebijakan publik, implementasi kebijakan, keterbukaan informasi, serta manajemen sumber daya manusia. Integrasi keempat perspektif ini menjadi kebaruan penelitian dalam melihat implementasi kebijakan secara komprehensif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan informasi publik?
2. Apa saja kendala yang dihadapi?

3. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas pengelolaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2025–2026.

Informan penelitian terdiri dari pejabat Sekretariat Daerah, pengelola informasi, staf Diskominfo, serta masyarakat sebagai pengguna layanan informasi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan indikator teori kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan keterbukaan informasi.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode.

**Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, yaitu menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan informasi publik, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi implementasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, hasil penelitian disajikan secara sistematis sebagai berikut.

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Informasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor telah dilaksanakan melalui beberapa mekanisme utama yang bersifat struktural dan operasional.

Pertama, dari aspek regulasi, pemerintah daerah telah menyusun kebijakan internal sebagai turunan dari Peraturan Bupati tentang layanan informasi publik. Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman bagi setiap unit kerja dalam mengelola, mengolah, dan mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya institusionalisasi kebijakan dalam organisasi.

Kedua, dari aspek kelembagaan, implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktor, yaitu Sekretaris Daerah sebagai pengambil kebijakan, unit kerja terkait sebagai penyedia data, serta Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola sistem informasi. Selain itu, masyarakat berperan sebagai pengguna layanan informasi publik. Keterlibatan multi-aktor ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bersifat kolaboratif.

Ketiga, dari aspek teknis operasional, pemerintah daerah telah memanfaatkan teknologi informasi melalui website resmi, media sosial, serta aplikasi layanan publik. Platform digital ini digunakan sebagai media utama dalam penyebaran informasi, termasuk informasi kebijakan, kegiatan pemerintahan, dan layanan publik. Selain itu, dilakukan proses validasi data sebelum publikasi serta pembaruan informasi secara berkala untuk menjaga akurasi dan relevansi informasi.

Keempat, dari aspek pelayanan publik, pemerintah telah menyediakan saluran komunikasi dua arah, seperti formulir pengaduan online dan layanan aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas layanan informasi publik.

Secara umum, implementasi kebijakan telah berjalan dengan dukungan regulasi, struktur organisasi, dan pemanfaatan teknologi digital. Namun, tingkat pemanfaatan oleh masyarakat masih belum optimal.

2. Kendala dalam Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa kendala utama yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan informasi publik.

Pertama, kendala koordinasi antar unit kerja. Proses pengumpulan data dan informasi dari berbagai unit kerja belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan oleh adanya keterlambatan penyampaian data serta ketidaksinkronan informasi antar unit, yang berdampak pada kualitas dan kecepatan penyajian informasi publik.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan informasi publik dan teknologi informasi masih terbatas. Kondisi ini mempengaruhi efektivitas proses pengelolaan, mulai dari pengumpulan data hingga publikasi informasi.

Ketiga, keterbatasan infrastruktur teknologi. Meskipun telah memanfaatkan platform digital, masih terdapat kendala teknis seperti keterbatasan sistem pendukung dan belum optimalnya integrasi antar platform informasi.

Keempat, rendahnya partisipasi dan literasi masyarakat. Tingkat pemanfaatan layanan informasi publik oleh masyarakat masih rendah, yang tercermin dari minimnya akses terhadap

website resmi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penyediaan informasi dan pemanfaatannya oleh masyarakat.

Kelima, keterbatasan sosialisasi kebijakan. Upaya penyebarluasan informasi mengenai hak akses informasi publik belum dilakukan secara maksimal, sehingga kesadaran masyarakat terhadap layanan informasi masih rendah.

3. Strategi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah dan perlu mengembangkan beberapa strategi implementasi kebijakan.

Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop di bidang pengelolaan informasi publik dan teknologi digital. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola informasi secara profesional.

Kedua, penguatan infrastruktur teknologi informasi melalui pengembangan website, optimalisasi media sosial, serta integrasi sistem informasi. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan informasi publik.

Ketiga, peningkatan koordinasi antar unit kerja melalui penetapan mekanisme kerja yang lebih sistematis dan terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Keempat, penguatan komunikasi publik melalui penyelenggaraan forum diskusi, sosialisasi, serta pemanfaatan media digital untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Kelima, pengembangan sistem evaluasi berbasis umpan balik masyarakat, yang dilakukan melalui survei kepuasan dan layanan pengaduan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

4. Kebaruan (Novelty) Temuan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara strategi digital, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan pendekatan partisipatif dalam implementasi kebijakan pengelolaan informasi publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi organisasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas keterbukaan informasi publik, khususnya pada tingkat pemerintah daerah.

**Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor telah berjalan secara struktural, namun belum

mencapai tingkat optimal dalam aspek fungsional dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan (policy design) dengan praktik implementasi (policy implementation) di lapangan.

Interpretasi Hasil Penelitian

Secara substantif, implementasi kebijakan telah didukung oleh keberadaan regulasi internal, struktur kelembagaan yang jelas, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai media penyebaran informasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif, pemerintah daerah telah memenuhi prasyarat dasar implementasi kebijakan. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih terbatas, yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat akses dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi publik.

Kendala utama yang ditemukan, seperti lemahnya koordinasi antar unit kerja, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya literasi digital masyarakat, menunjukkan bahwa permasalahan implementasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat sistemik dan kultural. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengelolaan informasi publik belum sepenuhnya mampu menjembatani kebutuhan informasi masyarakat secara efektif.

Hubungan Hasil Penelitian dengan Teori

Jika dianalisis menggunakan teori kebijakan publik, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan implementasi masih menjadi titik lemah dalam siklus kebijakan. Meskipun proses perumusan kebijakan telah dilakukan dengan baik, tahap implementasi belum sepenuhnya mampu menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas implementasinya.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, hasil penelitian menegaskan bahwa faktor sumber daya, komunikasi, dan koordinasi antar aktor merupakan determinan utama keberhasilan implementasi. Keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya gap antara kapasitas organisasi dengan tuntutan kebijakan.

Selanjutnya, dalam kerangka teori keterbukaan informasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi belum diikuti oleh tingkat pemanfaatan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi tersebut. Dengan kata lain, keterbukaan informasi harus dipahami sebagai proses dua arah yang melibatkan pemerintah sebagai penyedia dan masyarakat sebagai pengguna.

Selain itu, dari perspektif teori sumber daya manusia, keterbatasan kompetensi aparatur dalam pengelolaan informasi publik menjadi faktor penghambat utama. Hal ini memperkuat argumen bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Penelitian sebelumnya umumnya menyoroti permasalahan keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak akses informasi.

Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dengan menekankan pada aspek integrasi teknologi digital dalam pengelolaan informasi publik. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek administratif dan kelembagaan, penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi digitalisasi dan komunikasi publik menjadi faktor strategis yang menentukan efektivitas kebijakan di era modern.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antar unit kerja sebagai faktor internal yang seringkali kurang mendapat perhatian dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan penguatan terhadap teori implementasi kebijakan dengan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, integrasi teknologi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga memperkaya kajian keterbukaan informasi dengan menambahkan dimensi literasi digital sebagai variabel penting dalam efektivitas kebijakan.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah perlu melakukan penguatan pada tiga aspek utama, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi infrastruktur teknologi informasi, serta penguatan strategi komunikasi publik. Tanpa adanya perbaikan pada ketiga aspek tersebut, kebijakan keterbukaan informasi publik berpotensi tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antar unit kerja serta meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan tidak hanya tersedia, tetapi juga dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi penting baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan publik dengan mengintegrasikan perspektif kebijakan, teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi publik. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penekanan pentingnya pendekatan integratif yang menggabungkan aspek kelembagaan, teknologi digital, dan komunikasi publik sebagai kunci keberhasilan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan fenomena yang terjadi, tetapi juga memberikan arah solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

## Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor telah berjalan, namun belum optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi melalui pengembangan strategi berbasis digital dan penguatan komunikasi publik. Rekomendasi penelitian selanjutnya adalah mengkaji pengaruh literasi digital terhadap efektivitas kebijakan informasi publik.

## Daftar Pustaka

Adi, Y. (2026). Pengelolaan informasi publik di era digital oleh pemerintah daerah. *Jurnal Inovasi Administrasi*.

Alnoputra Ladperesi Ulaan, S., Sambiran, S., & Kasenda, V. (2022). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik (KIP) di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*.

Anderson, J. E. (2019). *Public policymaking: An introduction*.

Babbie, E. (2021). *The practice of social research*.

Birkland, I. (2020). *[Judul buku tentang bukti dan data dalam kebijakan publik]*].

Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (Eds.). (2019). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford University Press.

Bryman, A., & Bell, E. (2022). *Business research methods*

Cazalet, M. (2020). *[Judul buku/artikel tentang akuntabilitas moral dan etika]* [atau judul yang relevan].

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2020). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *[Judul buku tentang kebijakan publik yang selaras dengan nilai masyarakat]*.

Djalal, H. (2023). *[Judul buku/artikel tentang ruang lingkup dan indikator keterbukaan informasi]*.

Farida. (2015). *[Sumber tentang tantangan kesiapan SDM dalam pengelolaan informasi publik]*.

Flick, U. (2025). *[Judul buku tentang langkah sistematis dalam penelitian]*.

Kasmir, & Jakfar. (2022). *[Judul buku tentang SDM, kesejahteraan, dan indikator rekrutmen/pengembangan]*.

Kettunen, J., & Kallio, T. (2023). *[Judul buku/artikel tentang indikator kinerja, efisiensi, dan keberlanjutan akuntabilitas]*.

Kumar, R. (2023). *Research methodology: A step-by-step guide for beginners*.

Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2019). *Human resource management*.

Mardiana, F. R. (2024). Analisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Pendidikan. *Jurnal Edukasi dan Kebijakan Publik*.

Meyer, H., & Schiller, T. (2022). *[Judul buku tentang pemantauan, evaluasi, dan dimensi kebijakan publik]*.

Mulgan, G. (2021). *[Judul buku tentang dimensi akuntabilitas: politik, administratif, sosial]*.

Nawangsari, E. R., & Sari, W. K. (2019). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai upaya mewujudkan *good governance*. *Public Administration Journal of Research*.

Rogers, E. M. (2019). *[Judul buku tentang state of the art/inovasi]*.

Sulaiman. (2016). *[Sumber tentang preferensi masyarakat terhadap media sosial daripada website resmi]*.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sunarto. (2018). *[Sumber tentang kesenjangan antara kebijakan dan realisasi di lapangan]*.

Susanto, A. (2019). *[Judul buku/artikel tentang keterbukaan informasi sebagai pilar demokrasi]*.

Suherman, A. (2025). *Penelitian tentang keterbukaan informasi publik di Dinas Perumahan Rakyat* [Tesis].

Susi Andriany, & Ariyanti. (2023). Implementasi kebijakan keterbukaan dan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*.

Tanjung. (2017). *[Sumber tentang penyebab rendahnya pemanfaatan informasi digital]*.

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2024). *[Judul buku tentang integrasi metodologis mixed-methods]*.

Tjiptono, F., & Chandra, G. (2020). *Manajemen sumber daya manusia*.

Ulrich, D., & Dulebohn, W. (2021). *[Judul buku tentang peran strategis SDM]*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2008). *Sekretariat Negara Republik Indonesia*.

Zainal, & Rahman, A. (2021). *[Judul buku/artikel tentang penggunaan teknologi digital dan literasi digital]*.

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Pemerintah Daerah.